

Analisis Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 (Studi Kasus pada Dinas PPKAD selaku SKPKD)

Deasy Anastasia Mogi

Jenny Morasa

ABSTRACT

Local governments are required to make accountability reports that use accounting system that is set by the central government in the form of law – laws and regulations that are binding on all Government local government. Therefore, each Regional Financial Management Unit (SKPKD) must prepare its financial statements based on the government regulation number 24 of the Minister of home affairs Number 59 year 2007, which is an amandement to Permendagri NO. 13 year 2006 on guidelines financial Management.

The research was conducted in Sangihe regency, which in this study, analyzed fixed asset Recording and Reporting on Local Government in this case the Departement of finance and revenue management as a Regional Asset SKPKD for fiscal year 2011.

The purpose of this study is to analyzed the suitability of the recording and reporting of fixed assets in Sangihe regency government especially the Departement of revenue in the finance and asset management areas as SKPKD to financial statements in financial report balance Sangihe islanda District government with government regulation No. 24 year 2005 on standards government accounting and No. 13 year 2006 on Regional Financial Management Guidelslines.

The study uses a descriptive research design in the form of case studies. Type of data used is quantitative data that figures-figures in the Balance sheet. The author uses the method library research, field surveys, and documentation required for data collection.

The results showed that, Sangihe regency government has done the recording and reporting of fixed assets with good, though not fully in accordance with government Regulation No. 24 year 2005 regarding the Regulation of the minister and the government accounting standards of 2007 because the 2011 financial statements opinion gets no opinion (Disclaimer Opinion) by CPC caused by asset accounting. However, the financial statements have been prepared in time to be used for the users as decision makers and as refence for the preparation of financial statements with fiscal year 2012 and in accordance with government accounting standards.

Key Word: Fix Asset

1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi dapat dinilai kurang pesat. Pada waktu itu, akuntansi sektor publik kurang mendapat perhatian yang serius. Orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor industri (bisnis) dan cenderung mengarahkan pembangunan sektor publik.

Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi Tahun 1998. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 07, menjelaskan aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah bukan budaya.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk aset tetap pemerintah yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, kontraktor, hak atas tanah. Tidak termasuk definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku pengelola keuangan daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya kepada Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari alasan pemilihan judul di atas maka penulis ingin menganalisis tentang Pencatatan dan Pelaporan Keuangan yang dalam hal ini mengenai Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang dituangkan dalam bentuk laporan akhir yang berjudul "Analisis Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 (Studi Kasus pada Dinas PPKAD selaku SKPKD)".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan aset tetap keuangan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dengan membandingkan antara sistem pelaporan keuangan aset tetap yang dilaksanakan di SKPKD dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

2.3 Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Dalam konstruksi keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja yaitu:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

2.4 Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah :

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya.
- b. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan aset Daerah (DPPKAD) selaku SKPKD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakupkan oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan data penelitian, Neraca Pemerintah Kabupaten Sangihe untuk Tahun Anggaran 2011, menunjukkan bahwa :

Tahun 2011, Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe senilai Rp 999.452.205.988,98 yang terdiri dari :

- a. Aset Lancar Rp. 48.557.782.857,81

2.	Tanah Kantor	xxx			
	Diinvestasikan Dalam Aser Tetap		xxx		
3.	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah			xxx	
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap				xxx
4.	Tanah Sarana Umum Pasar	xxx			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		xxx		
5.	Tanah Kantor	xxx			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		xxx		
6.	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan			xxx	
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap				xxx

Tabel 4.4
BUKU BESAR

PEMRINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Bagian Administrasi dan Umum
Kode Rekening Buku besar :
Nama Rekening Buku Besar :

Tanggal	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
xx/xx/20xx	Saldo Awal	1			xxx
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
	Jumlah		Rp. xxx	Rp. -	Rp. xxx

Hasil olahan data DPPKAD

Tabel 4.5
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BUKU BESAR PEMBANTU

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib
 Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
 Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
 Kode rekening buku besar :
 Nama rekening buku besar pembantu:

No	Tgl	Referensi		Uraian	Debet	Kredit	Saldo
		No. Bukti	Kode Rek. Lawan				
				Saldo awal	xxx		
				Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx	
				Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx	
				Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx	
				Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx	
				Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx	
Jumlah					xxx	xxx	

Hasil olahan data DPPKAD

Tabel 4.6
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NERACA SALDO
31 DESEMBER 20xx

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
		Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Aset Tetap- Tanah	xxx	
	Dinvestasikan dalam Aset Tetap		xxx
Jumlah		xxx	xxx

Hasil olahan data DPPKAD

Untuk Tahun Anggaran 2011, akuntansi aset untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diberi opini tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*) oleh BPK, karena adanya penyalahgunaan sejumlah aset tetap oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2010, tanah yang belum memiliki sertifikat sebanyak 107 jenis tanah dengan nilai sebesar Rp. 16.399.005.936,00 dan 32 jenis tanah telah didukung dengan sertifikat atas 119 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp. 22.908.661.426,00. Pada tahun 2011 pemerintah daerah melalui sekretariat Daerah mengadakan pengadaan dua bidang tanah kantor senilai Rp. 17.100.000,00, atas pembelian tersebut belum didukung dengan sertifikat tanah. Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan tanah diketahui bahwa selama tahun 2011 belum ada penambahan sertifikat tanah hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 paragraf 72

Tabel 4.7
Ringkasan Hasil Analisis Pencatatan Aset Tetap-Tanah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (yang dilakukan oleh Dinas PPKAD selaku SKPKD) untuk Laporan Keuangan Tahun 2011

No	Prosedur	Pencatatan PPKD Kab. Kep Sangihe (contoh jurnal yang ada)	SAP PP No 24 Tahun 2005	Permendagri No. 59 tahun 2007	Ket
1	Akuntansi Aset	Belanja Modal-Tanah Kas di Kas Daerah <u>Jurnal Korolari (pengakuan aset tetap) :</u> Aset tetap – Tanah Diinvestasikan pd aset tetap	Tidak sepenuhnya sesuai	Tidak sepenuhnya sesuai	Aset tetap tanah tidak sesuai dengan ketentuan yaitu terdapat tanah yang belum didukung oleh bukti kepemilikan (SAP NO. 7)

Sumber : Hasil Data Olah Tahun 2011

4.2.2 Analisis Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada umumnya telah menyusun Laporan Keuangan tahunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada umumnya telah melakukan pencatatan akuntansi aset dalam hal ini akuntansi aset tetap yang baik, sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, Pada Tahun 2011 belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 paragraf 72 (dalam aset tetap tanah, masih banyak tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan/sertifikat dan juga aset tetap yang diserahkan pada pemerintah pusat masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah dan adanya penyalahgunaan sejumlah aset di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe) tetapi karena minimnya informasi yang diberikan maka tidak diketahui bahwa aset tetap apa yang disalahgunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menyebabkan laporan keuangan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*).
2. Untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 karena pada akuntansi aset, aset tetap tanah, masih banyak tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan/sertifikat dan juga aset tetap yang diserahkan pada pemerintah pusat masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah, sehingga laporan audit oleh BPK tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*), maka Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.2 Saran

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih memperhatikan lagi mengenai aset tetap, sehingga untuk tahun anggaran berikutnya, penggunaan aset tetap dapat menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : PT. Indeks.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Hartina, Silka, 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data dan Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hidayah, Nurul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah dan Swasta*. Modul Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Horngren T, Charles, dkk. 2006. *Akuntansi, jilid 1, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Indrianto, N, Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPF.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.